

Simulasi Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Dosen Pengampu Mata Kuliah: Dr. Apri Wahyudi, M.Pd Dr. Nikki Tri Sakung, M.Pd



Disusun Oleh:

Kelompok 3

Zia Febria	2413034003
Widia candra	2413034037
Aurilia Jua Arista	2413034099
Frizca Azzahra Fasyah	2453034002

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah dengan judul “Simulasi Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, mensimulasikan, serta mengimplementasikan perencanaan pengembangan sekolah secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Diharapkan melalui kegiatan ini, sekolah mampu merumuskan arah pengembangan yang jelas, terukur, serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan mutu pendidikan melalui perencanaan dan penyusunan RKS yang efektif.

Bandar Lampung, 08 september 2025

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Konsep perencanaan dan simulasi pengembangan sekolah	3
B. Faktor-Faktor Penyusunan RKS dalam Keselarasan dengan Visi dan Misi Sekolah.....	5
C. Langkah-langkah simulasi perencanaan pengembangan sekolah	6
D. Tantangan dan Solusi dalam perencanaan pengembangan sekolah	9
E. Peran stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan RKS untuk pengembangan berkelanjutan.....	12
F. Studi kasus	14
BAB III PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap sekolah dituntut untuk mampu melakukan perencanaan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja Sekolah (RKS), yang berfungsi sebagai pedoman pengembangan program, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi kinerja sekolah (Mulyasa, 2013).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, RKS disusun untuk jangka menengah (empat tahun) serta dijabarkan ke dalam rencana tahunan yang lebih operasional. Penyusunan RKS menuntut adanya keterlibatan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, hingga masyarakat (Kemendiknas, 2007). Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang menekankan pada kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sekolah mampu menyusun RKS secara optimal. Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam menganalisis kebutuhan, menentukan prioritas program, serta menyusun indikator pencapaian yang terukur (Nurkolis, 2016). Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya implementasi program pengembangan sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah simulasi perencanaan pengembangan sekolah yang dapat membantu pihak sekolah dalam merumuskan strategi pengembangan serta menyusun RKS sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Melalui simulasi, sekolah dapat mempraktikkan proses perencanaan mulai dari analisis situasi, identifikasi kebutuhan, penyusunan program, hingga evaluasi. Dengan demikian, RKS yang dihasilkan tidak hanya

menjadi dokumen administratif, melainkan juga instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perencanaan pengembangan sekolah dapat dilaksanakan secara sistematis serta disesuaikan dengan kebutuhan sekolah?
2. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah?
3. Bagaimana langkah-langkah simulasi perencanaan pengembangan sekolah dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penyusunan RKS?
4. Hambatan-hambatan apa yang berpotensi muncul dalam proses perencanaan pengembangan sekolah, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?
5. Bagaimana peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunan serta pelaksanaan RKS guna mendukung pengembangan sekolah secara berkelanjutan.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses perencanaan pengembangan sekolah yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah.
3. Menjelaskan langkah-langkah simulasi perencanaan pengembangan sekolah dalam meningkatkan efektivitas penyusunan RKS.
4. Menganalisis hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses perencanaan pengembangan sekolah serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan.

5. Menjelaskan peran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunan dan pelaksanaan RKS guna mendukung pengembangan sekolah secara berkelanjutan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep perencanaan dan simulasi pengembangan sekolah

Perencanaan pengembangan sekolah merupakan suatu upaya untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Agar perencanaan tersebut efektif, diperlukan suatu proses yang sistematis, yaitu terstruktur, berurutan, dan berbasis pada kebutuhan nyata sekolah. Secara umum, proses perencanaan pengembangan sekolah secara sistematis meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Analisis Kondisi Sekolah

Langkah awal dalam perencanaan pengembangan sekolah adalah melakukan analisis kondisi sekolah secara menyeluruh melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sekolah, baik dari aspek internal maupun eksternal. Aspek internal mencakup kinerja kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, serta pembiayaan. Sementara itu, aspek eksternal meliputi peran serta masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta perkembangan sosial dan teknologi. Analisis ini penting agar perencanaan yang dibuat benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata dan bukan sekadar formalitas.

2. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Setelah kondisi sekolah dianalisis, tahap berikutnya adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi harus mencerminkan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai sekolah, sedangkan misi berfungsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan sekolah dirumuskan lebih operasional dengan indikator yang dapat diukur. Perumusan visi, misi, dan tujuan ini harus selaras dengan kebijakan pendidikan nasional serta kebutuhan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, arah pengembangan sekolah menjadi lebih jelas dan terukur.

3. Penetapan Prioritas Program Pengembangan

Tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas program pengembangan sekolah. Program ini harus realistis, relevan, dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Penetapan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan aspek urgensi, dampak terhadap mutu pendidikan, dan potensi dukungan dari berbagai pihak. Contoh prioritas program antara lain peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, perbaikan sarana prasarana, dan penguatan hubungan dengan masyarakat.

4. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Rencana Kerja Sekolah (RKS) disusun sebagai dokumen perencanaan yang sistematis, memuat rencana jangka menengah (empat tahunan) dan rencana tahunan. RKS harus menjabarkan program prioritas ke dalam indikator keberhasilan, target capaian, strategi pelaksanaan, dan kebutuhan pembiayaan. Penyusunan RKS tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi melibatkan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, bahkan pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, RKS dapat menjadi dokumen yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sekolah.

5. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Tahap akhir dalam perencanaan pengembangan sekolah adalah menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan perencanaan, sementara evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas dan dampak program terhadap mutu pendidikan. Dari hasil evaluasi, sekolah dapat melakukan perbaikan berkelanjutan serta menetapkan tindak lanjut yang diperlukan. Dengan demikian, perencanaan tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam peningkatan mutu pendidikan.

B. Faktor-Faktor Penyusunan RKS dalam Keselarasan dengan Visi dan Misi Sekolah

Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) merupakan langkah strategis untuk mengarahkan pengembangan sekolah agar lebih terencana, efektif, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pendidikan. Agar RKS dapat berfungsi optimal, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Rencana Kerja Sekolah (RKS) harus disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah. Hal ini penting karena visi menjadi arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. RKS harus menjabarkan visi dan misi ke dalam program kerja yang operasional, terukur, dan realistis. Tanpa adanya keterkaitan yang erat, program kerja dalam RKS akan kehilangan arah dan tidak mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.

2. Analisis Kebutuhan Sekolah

Faktor kedua adalah melakukan analisis kebutuhan berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Melalui analisis ini, sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan yang harus dipertahankan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta tantangan yang harus diantisipasi. Analisis kebutuhan yang komprehensif akan menghasilkan prioritas program kerja yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di sekolah.

3. Ketersediaan Sumber Daya

Penyusunan RKS juga harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pembiayaan. Rencana kerja yang disusun tanpa memperhatikan kapasitas sumber daya berpotensi sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap program harus dihitung kebutuhan dan ketersediaan sumber dayanya agar implementasinya berjalan efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, pendanaan yang memadai, serta sarana

prasarana yang mendukung merupakan aspek vital dalam penyusunan RKS.

4. Partisipasi Pemangku Kepentingan

RKS harus mencerminkan hasil musyawarah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan bahkan masyarakat sekitar. Keterlibatan stakeholder tidak hanya meningkatkan legitimasi RKS, tetapi juga memastikan adanya dukungan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya partisipasi aktif, setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

5. Kebijakan Pemerintah dan Standar Nasional Pendidikan

Selain kebutuhan internal sekolah, penyusunan RKS harus mengacu pada kebijakan pemerintah serta Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini untuk memastikan bahwa program yang direncanakan tidak menyimpang dari kebijakan pendidikan nasional dan tetap selaras dengan standar mutu yang ditetapkan. Dengan demikian, pengembangan sekolah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian target pendidikan nasional.

6. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penyusunan RKS. Setiap program yang direncanakan harus disertai indikator keberhasilan, tolok ukur capaian, serta metode evaluasi. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas program, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan memastikan tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal.

C. Langkah-langkah simulasi perencanaan pengembangan sekolah

Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan pada tingkat permulaan dan merupakan aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud dan tujuan yang ingin dicapai. langkah-langkah perencanaan strategis sekolah memberikan panduan konkret dalam menyusun rencana yang terarah. Dari penentuan tujuan, pengumpulan data, hingga evaluasi, setiap langkah memiliki

peran penting dalam memastikan rencana berjalan sesuai dengan harapan. Ini memberikan panduan praktis kepada pengelola pendidikan dalam mengembangkan rencana strategis yang efektif dan adaptif.

Dalam keseluruhan, rencana strategis sekolah adalah alat penting untuk membentuk arah, tujuan, dan tindakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Adapun langkah-langkah perencanaan tersebut (Sudiana, 2018) meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang diperlukan. Keempat, menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan. Kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan. Keenam, menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari tindakan tersebut. Ketujuh, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana.

Sedangkan menurut Banghart dan Trull sebagaimana dikutip Udin Sa'ud Syaifuddin (Sahnan, 2017a), ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan di sebuah sekolah, antara lain:

Pertama, tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kajian awal ini harus cermat, karena fungsi kajian akan memberikan masukan tentang: pencapaian program sebelumnya; sumber daya apa yang tersedia; dan apa yang akan dilakukan dan bagaimana tantangan ke depan yang akan dihadapi.

Kedua, tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada visi, misi dan hasil kajian awal tentang beragam kebutuhan atau taksiran (assessment) layanan pendidikan yang diperlukan.

Ketiga, tahap policy and priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Rumusan prioritas kebijakan ini harus dijabarkan ke dalam strategi dasar layanan pendidikan yang jelas, agar memudahkan dalam pencapaian tujuan.

Keempat, tahap program and project formulation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non akademik.

Kelima, tahap feasibility testing, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya (sumber daya internal/eksternal; atau sumber daya manusia/material). Apabila perencanaan disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia secara cermat dan akurat, akan menghasilkan tingkat kelayakan rencana pendidikan yang baik.

Keenam, tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh: kualitas sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa); iklim atau pola kerjasama antarunsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja (team work) yang handal; dan kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan.

Ketujuh, tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai (mengevaluasi) tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, sebagai feedback (masukan atau umpan balik), selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan yaitu: perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas; bersifat sederhana, realistis dan praktis; terinci dan memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan, sehingga mudah dipedomani dan dijalankan; memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta

kondisi dan situasi; diusahakan agar tidak terjadi duplikasi dalam pelaksanaan (Nurindarwati, 2020).

Dalam konteks pendidikan, perencanaan memiliki peran yang tidak tergantikan dalam mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah perencanaan yang diperinci oleh Asnawir, seperti merumuskan tujuan, mengumpulkan data, dan menentukan tahapan tindakan, memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan strategi yang terarah. Begitu pula dengan tahapan yang dianut oleh Banghart dan Trull, yang lebih menekankan pada pengidentifikasian kebutuhan, perumusan tujuan, dan pengaturan prioritas kebijakan dalam rencana pendidikan.

D. Tantangan dan Solusi dalam perencanaan pengembangan sekolah

Perencanaan pengembangan sekolah merupakan upaya sistematis dalam menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan ini mencakup aspek akademik, manajemen, pengembangan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan budaya sekolah. Dengan perencanaan yang baik, sekolah dapat bergerak secara terarah menuju perbaikan dan inovasi berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan pengembangan sekolah sering kali menemui berbagai hambatan. Hambatan ini dapat berasal dari internal sekolah maupun faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut serta mencari solusi yang tepat guna mendukung efektivitas proses perencanaan.

Hambatan dalam Proses Perencanaan Pengembangan Sekolah

1. Kurangnya Partisipasi Stakeholder

Salah satu hambatan utama dalam perencanaan pengembangan sekolah adalah minimnya keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder), seperti guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Padahal, perencanaan yang baik seharusnya bersifat partisipatif, agar rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata sekolah.

Contoh: Rencana pengembangan fasilitas laboratorium tidak didasarkan pada masukan guru IPA atau kebutuhan siswa, sehingga fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan belajar.

2. Data dan Informasi Tidak Akurat

Perencanaan yang efektif memerlukan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Jika sekolah menggunakan data yang sudah usang atau tidak valid, maka keputusan yang diambil dalam perencanaan bisa menjadi tidak relevan atau bahkan keliru. Contoh: Data jumlah siswa per kelas yang tidak diperbarui menyebabkan perencanaan ruang belajar menjadi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

3. Terbatasnya Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Banyak sekolah mengalami keterbatasan dalam hal ini, sehingga meskipun rencana pengembangan sudah disusun, implementasinya sulit dilaksanakan. Contoh: Sekolah merencanakan pelatihan guru berbasis teknologi digital, tetapi tidak memiliki anggaran dan fasilitas pendukung seperti laptop dan koneksi internet yang memadai.

4. Kapasitas Manajerial yang Rendah

Kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial sering kali belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun perencanaan strategis berbasis data. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen modern mengakibatkan rencana yang dibuat bersifat normatif dan tidak operasional. Contoh: Rencana strategis sekolah hanya berupa daftar program tahunan tanpa indikator kinerja atau analisis SWOT yang jelas.

5. Budaya Sekolah yang Kurang Mendukung Perubahan

Perubahan dan inovasi memerlukan budaya organisasi yang adaptif dan terbuka. Jika budaya sekolah masih bersifat birokratis, kaku, dan menolak perubahan, maka rencana pengembangan akan sulit dilaksanakan secara efektif. Contoh: Ketika sekolah ingin

menerapkan pembelajaran berbasis proyek, banyak guru yang menolak karena sudah terbiasa dengan metode ceramah.

6. Tidak Konsistennya Implementasi dengan Rencana

Banyak sekolah memiliki dokumen perencanaan (seperti RKS/RKJM) yang baik, namun implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini sering disebabkan oleh lemahnya monitoring dan evaluasi, atau kurangnya komitmen dari pelaksana. Contoh: Sekolah telah menetapkan program peningkatan literasi, tetapi tidak ada kegiatan nyata yang dilakukan terkait dengan program tersebut sepanjang tahun.

7. Perubahan Kebijakan Pendidikan yang Cepat

Faktor eksternal seperti perubahan kurikulum, regulasi dari Kementerian Pendidikan, atau peraturan daerah dapat mengganggu kesinambungan perencanaan. Sekolah harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, sehingga rencana yang sudah disusun bisa menjadi tidak relevan. Contoh: Sekolah merancang program berbasis Kurikulum 2013, tetapi kemudian diwajibkan beralih ke Kurikulum Merdeka dalam waktu singkat.

Solusi yang Dapat Diterapkan

1. Peningkatan Partisipasi Stakeholder

Melibatkan semua pihak sejak tahap awal perencanaan, baik melalui forum diskusi, kuesioner, atau musyawarah bersama. Ini akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap rencana dan memperkuat komitmen dalam pelaksanaan.

2. Penguatan Sistem Pendataan Sekolah

Mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah (SIMS) yang terintegrasi dan memperbarui data secara berkala. Pemanfaatan platform seperti Dapodik juga harus dimaksimalkan.

3. Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Memberikan pelatihan secara berkala kepada kepala sekolah dan tim perencana tentang perencanaan strategis, manajemen berbasis data, dan evaluasi program.

4. Kemitraan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sekolah perlu membangun kerja sama dengan pihak luar seperti dinas pendidikan, dunia usaha, dan alumni. Selain itu, anggaran sekolah harus dikelola secara efisien dan dialokasikan berdasarkan prioritas kebutuhan.

5. Membangun Budaya Inovatif

Mendorong guru dan staf untuk terbuka terhadap perubahan melalui pendekatan coaching, pembelajaran kolaboratif, serta pemberian insentif atau penghargaan atas inovasi yang dilakukan.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Menyusun indikator kinerja utama (IKU) dan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

7. Perencanaan yang Fleksibel dan Adaptif

Rencana pengembangan sekolah harus dirancang dengan ruang fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan. Revisi rencana secara berkala penting untuk menjaga relevansi.

Perencanaan pengembangan sekolah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan partisipasi semua pihak, data yang valid, pemimpin yang kompeten, serta sistem pendukung yang memadai. Hambatan yang muncul dalam proses ini harus diidentifikasi sejak awal agar bisa diatasi secara strategis. Dengan mengimplementasikan solusi yang tepat, sekolah dapat melakukan pengembangan secara berkelanjutan dan mencapai peningkatan mutu pendidikan secara signifikan

E. Peran stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan RKS untuk pengembangan berkelanjutan

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk pengembangan berkelanjutan, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki peran esensial: guru sebagai pelaksana kurikulum, kepala sekolah sebagai fasilitator dan pengarah, orang tua sebagai mitra dan pengawas, serta masyarakat dan pemerintah sebagai penyedia sumber daya

dan kebijakan. Kolaborasi aktif dan komunikasi efektif antar-pemangku kepentingan menghasilkan RKS yang lebih baik, dukungan finansial, dan lingkungan belajar yang inklusif serta berkualitas.

Peran Masing-masing Stakeholder:

- Guru: Pengembang Kurikulum: Berperan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang inovatif dan relevan. Pelaksana Pembelajaran: Bertanggung jawab untuk melaksanakan program pembelajaran, membimbing siswa, dan memantau perkembangan belajar mereka. Penyedia Wawasan: Memberikan ide dan wawasan kreatif yang mendukung kemajuan sekolah.
- Kepala Sekolah: Fasilitator dan Pengarah: Mengarahkan dan memfasilitasi seluruh kegiatan pengembangan sekolah. Pengelola Stakeholder: Membangun komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan. Pengawas dan Evaluator: Melakukan observasi, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan RKS berjalan sesuai rencana.
- Orang Tua: Mitra Pendidikan: Menjadi mitra dalam implementasi kebijakan pendidikan di rumah dan sekolah. Dukungan Holistik: Memberikan dukungan yang holistik bagi anak-anak mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan. Pengawas Internal: Berperan dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan sekolah, termasuk pengelolaan keuangan untuk fasilitas.
- Masyarakat dan Pemerintah: Penyedia Sumber Daya: Mendukung penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai, terutama di daerah terpencil. Pengawas Eksternal: Berpartisipasi dalam pengawasan dan memastikan kualitas pendidikan. Perumus Kebijakan: Membantu mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata melalui kebijakan yang mendukung.

Manfaat Kolaborasi Stakeholder:

- RKS Lebih Akurat: Keterlibatan semua pihak menghasilkan RKS yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah.

- Peningkatan Kualitas: Sinergi antar-stakeholder menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan berkualitas.
- Dukungan Finansial: Keterlibatan masyarakat dan pemerintah mendukung ketersediaan dana untuk pengembangan fasilitas.
- Pendidikan Inklusif: Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat membantu mengatasi disparitas pendidikan dan menciptakan pendidikan yang merata

F. Studi kasus

SDN Bugangan 02 Semarang menghadapi masalah mutu pendidikan rendah, khususnya literasi (nilai ANBK rata-rata 58) serta sarana prasarana perpustakaan yang terbatas. RKS sebelumnya hanya bersifat administratif, tanpa indikator terukur.

Permasalahan:

1. RKS lama tidak berbasis data.
2. Indikator capaian tidak terukur.
3. Anggaran tidak sesuai prioritas.
4. Penyusunan hanya melibatkan kepala sekolah.

Solusi;

1. Intervensi (Simulasi Penyusunan RKS)
2. Analisis rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan
3. Identifikasi masalah utama: rendahnya literasi
4. Penyusunan program literasi dengan indikator SMART: nilai literasi ANBK naik dari 58 → 70 dalam 1 tahun
5. Alokasi anggaran Rp 15 juta untuk buku bacaan & pelatihan guru.
6. Melibatkan guru & komite sekolah melalui simulasi kelompok

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simulasi Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi seluruh peserta. Kegiatan ini menegaskan bahwa penyusunan RKS bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah proses strategis untuk mengarahkan sekolah dalam mencapai visi, misi, serta tujuan pendidikan. Melalui simulasi, peserta belajar mengidentifikasi permasalahan, potensi, dan kebutuhan nyata sekolah sehingga mampu menentukan prioritas program yang tepat dan realistis untuk dijalankan. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak sekolah, guru, komite, maupun orang tua. Dengan demikian, simulasi ini berhasil membekali sekolah dengan gambaran yang lebih jelas dan terarah dalam menyusun rencana kerja yang terukur, sistematis, dan berkesinambungan.

B. Saran

RKS yang telah disusun hendaknya tidak berhenti hanya sebagai dokumen formal, melainkan perlu dilaksanakan dengan konsisten serta dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan dan menemukan solusi atas kendala yang ada. Selain itu, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam bidang manajemen sekolah serta perencanaan strategis perlu dilakukan secara berkelanjutan agar proses penyusunan RKS semakin profesional. Hasil dari simulasi ini juga sebaiknya ditindaklanjuti dengan penerapan nyata di sekolah masing-masing, sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi RKS juga dianjurkan agar pengelolaan program sekolah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Panduan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyani, D. S., & Virgianti, P. (2023). Perencanaan Strategis Sekolah. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 99-110.
- Kemendikbud. (2020). *Panduan Perencanaan Berbasis Data*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Mulyasa, E. (2016). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarsono, R. B. (2017). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Dirjen GTK Kemendikbud. (2019). *Modul Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suyanto, M., & Djihad, A. (2013). *Manajemen Pendidikan: Strategi Mengelola Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4*. Paris: UNESCO Publishing.
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.